

---

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Asson Any

Universitas Muhammadiyah Jambi

[Sedjati.seruni@gmail.com](mailto:Sedjati.seruni@gmail.com)

Dr. Arniwita Sy, S.Pd.,MM

Universitas Muhammadiyah Jambi

[Arniwita38@gmail.com](mailto:Arniwita38@gmail.com)

Ade Irma Suryani, SE.,MM

Universitas Muhammadiyah

[Adeirma.utama@gmail.com](mailto:Adeirma.utama@gmail.com)

### ABSTRAK

*Provinsi Jambi menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi faktor kunci keberhasilan e-government karena berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan, khususnya dalam proses perencanaan anggaran, dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang digunakan dalam penelitian. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi agar kinerja sistem semakin optimal.*

*SIPD terbukti berkontribusi besar dalam pengelolaan aset daerah melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih akurat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya hambatan utama berupa keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penginputan data ke SIPD. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.*

**Kata kunci :** Implementasi, SIPD, Evaluasi RKA, Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia tengah menjalani proses pembangunan menuju pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance. Pemerintahan yang baik ini ditandai oleh adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang menjadi pondasi dalam pelaksanaan sistem tersebut. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri good governance (Maryam, 2023).

Salah satu aspek penting didalam penyelenggaran Pemerintahan adalah aspek Teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan, atau disebut e-government, memungkinkan penyediaan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Teknologi digital telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi kini digunakan secara luas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sulaiman. A, 2020). Dengan pemanfaatan TIK diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintah semakin mudah.

Ditingkat pemerintah daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah di implementasikan sebagai satu diantara beberapa cara untuk membantu proses perancangan, penganggaran, pelaporan, dan pemantauan keuangan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah terobosan baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 27 September 2019. Kehadiran SIPD ini menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya

---

digunakan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik (Nasution et al., 2021).

Pada tahun 2023, Kemendagri kembali menerbitkan SIPD versi terbaru yang bernama SIPD RI yang telah diuji coba pada tahun anggaran 2023. Meskipun uji coba tersebut hanya sebatas pada proses perencanaan dan penganggaran saja, namun Kemendagri telah menetapkan kebijakan bahwa pemerintah daerah harus sepenuhnya melakukan perencanaan dan penganggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD RI mulai tahun anggaran 2024. Untuk mewujudkan sinergi di lingkungan pemerintah, BPKP juga akan menghentikan layanan aplikasi SIMDA/FMIS. SIPD RI akan digunakan oleh pemerintah daerah nantinya mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, yang sebelumnya dikenal sebagai Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi, menanggapi diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2006. Namun, seiring dengan berlakunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang menggantikan regulasi sebelumnya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi, termasuk BPKPD, sudah tidak lagi menggunakan SIMDA. Sebagai gantinya, mereka kini menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kegiatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sumber utama pembiayaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan melalui rincian data pada rekening belanja yang tercantum dalam dokumen anggaran, efektivitas pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dievaluasi. Berbeda dengan SIMDA yang memiliki keterbatasan dalam struktur data terpadu, SIPD justru hadir dengan sistem terpusat yang lebih

---

efisien. Dengan adanya teknologi informasi, keandalan SIPD dapat lebih meningkat sehingga dapat mencapai sistem pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan (Arif & Firmansyah, 2024), sehingga dapat mendukung penyebarluasan informasi pemerintahan daerah kepada publik secara lebih optimal.

Pada dasarnya, sistem informasi pemerintahan merupakan perpaduan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang bekerja secara terintegrasi dan berurutan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Informasi tersebut dibutuhkan demi tercapainya tujuan organisasi di berbagai tingkatan pemerintahan daerah serta untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sistem pengelolaan informasi yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan prinsip efisiensi serta efektivitas kinerja.

Salah satu tujuan utama dari penerapan SIPD adalah menciptakan keterbukaan informasi kepada publik. Standar minimum yang wajib dipenuhi oleh SIPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. SIPD tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan (Maulani et al., 2024).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam proses perencanaan anggaran daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk mendukung percepatan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan public, namun dalam pelaksanaannya di lingkungan BPKPD Provinsi Jambi, masih terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi. Untuk itu dalam menjalankan program ini tidaklah mudah sehingga memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat (Adisi &

---

Sadad, 2022). Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sarana teknologi informasi, seperti koneksi internet yang tidak stabil, terutama saat banyak pengguna mengakses situs SIPD secara bersamaan. Di samping itu, sistem atau aplikasi SIPD sendiri masih belum optimal, sehingga sering mengalami gangguan seperti server yang tidak dapat diakses. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas penggunaan SIPD dan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Disamping itu, salah satu aspek yang turut memengaruhi implementasi SIPD adalah sumber daya manusia sebagai pengguna sistem, yakni para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Sebagian besar pegawai masih terbiasa menjalankan pekerjaan secara manual, sehingga adaptasi terhadap sistem digital berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya optimal. Dari sisi organisasi, koordinasi lintas unit serta pembagian peran dan tanggung jawab yang terstruktur menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan SIPD. Kurangnya kegiatan sosialisasi dan tidak adanya pelatihan yang berkelanjutan dapat menjadi penghambat dalam pemanfaatan sistem ini secara maksimal, khususnya dalam proses evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan ke bagian Anggaran di lingkungan BPKPD.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas Perencanaan Anggaran di dinas-dinas terkait, akan tetapi juga dapat menjadi model bagi instansi pemerintahan lainnya dalam mengoptimalkan penerapan SIPD.

### 1. Implementasi Sistem

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

#### a. Sosialisasi Bimtek BPKPD

Penyuluhan mengenai pentingnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan baik di lingkungan instansi pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Sosialisasi internal ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pemahaman terhadap manfaat SIPD serta mendorong terciptanya komitmen dalam pelaksanaannya. Sementara

itu, sosialisasi eksternal kepada masyarakat berperan dalam memperkuat keterbukaan informasi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta dapat berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin. Kegiatan ini mencakup pengenalan dasar mengenai penggunaan SIPD, prosedur penginputan data ke dalam sistem, serta teknik dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan melalui platform tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pegawai daerah memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan sistem secara efektif, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan dalam proses pengisian data.

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Secara umum, Sistem Informasi Pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk transformasi atau pengembangan dari sistem informasi konvensional, yang merupakan suatu kesatuan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang bekerja secara sistematis dan saling mendukung dalam memproses data menjadi informasi yang bermanfaat. Sementara itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merujuk pada pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip akurasi dan efisiensi. Adapun manfaat aplikasi SIPD yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, sistem yang terintegrasi mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat, serta SIPD diharapkan terintegrasi dengan system pengadaan barang dan jasa LKPP (<sup>1</sup>Dina Triana Wahyuningsih <sup>2</sup>Supanji Setyawan Kartika Pradana Suryatimur, 2022).

Pengelolaan SIPD bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pemerintahan daerah disusun dan disajikan secara profesional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang

---

mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi pemerintahan daerah ini sudah cukup representative dalam memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution et al., 2021). Sebagai bentuk pelaksanaan dari kewajiban tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang memuat klasifikasi-komponen dalam pengembangan SIPD oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas beberapa bagian berikut:

a. Informasi pengembangan Daerah

Sistem informasi pada pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam proses tersebut.

b. Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan keuangan ini mencakup beberapa tahapan penting, antara lain:

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran daerah
3. Pencatatan serta pelaporan informasi keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah
5. Pertanggungjawaban atas pengelolaan aset daerah
6. Informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan daerah

c. Informasi Lain Terkait Pemerintahan Daerah

Berbagai informasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat diakses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait.

### 3. Pokok Permasalahan

- a. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu penyebab lambatnya penerapan SIPD secara menyeluruh di sejumlah pemerintah daerah.
- b. Minimnya tenaga SDM yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan SIPD secara optimal, mengingat seluruh proses pengelolaan keuangan daerah kini berbasis digital melalui sistem tersebut.
- c. Masih ditemui berbagai kendala teknis di lapangan, seperti belum seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui SIPD, gangguan jaringan, serta sistem aplikasi yang sering mengalami penurunan performa (down). Hal ini mendorong perlunya evaluasi dari pemerintah pusat agar sistem dapat berfungsi secara maksimal, mengingat hampir seluruh aktivitas pemerintahan kini bergantung pada SIPD.

## METODOLOGI

Penjabaran mengenai metode penelitian disampaikan pada bagian ini. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan orientasi induktif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan kondisi aktual di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses evaluasi perencanaan anggaran di lingkungan SKPD pada BPKPD Provinsi Jambi.

Informan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Analis Perencanaan Anggaran dari BPKPD Provinsi Jambi, yang memiliki peran langsung dalam penginputan data rencana anggaran ke dalam aplikasi SIPD. Sementara itu,

informan tambahan terdiri dari Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD, yang turut terlibat dalam pelaksanaan SIPD secara langsung. Peneliti memilih kedua kategori informan ini karena dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan serta mendalam mengenai proses implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan, akurat, serta dapat dipercaya mengenai penerapan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mendukung, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai SIPD.

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kualitatif, dengan mengacu pada model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, pedoman wawancara, perangkat penunjang dan catatan lapangan (Rochmanjshah & Sholeh, 2010). Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring dan memilih informasi yang relevan dari data utama maupun tambahan. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil temuan di lapangan.

## **HASIL**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inovasi digital yang dirancang untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, penerapan SIPD diharapkan mampu mendorong peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

---

---

Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan SIPD telah memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Analis Perencanaan Anggaran di BPKPD Provinsi Jambi, yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Sejak diterapkannya SIPD, kami merasakan bahwa proses pengumpulan serta pelaporan data menjadi jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Sistem ini mempermudah kami dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai unit kerja, sehingga meminimalkan kesalahan manual yang dulu kerap terjadi. Tingkat transparansi juga meningkat karena data kini dapat diakses dan ditinjau dengan lebih mudah oleh pihak-pihak terkait. Meskipun pada awal penggunaan sempat ada kendala dalam memahami sistem baru ini, saat ini kami sudah lebih terbiasa dan merasa percaya diri. Tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam, sehingga kami bisa lebih fokus pada pekerjaan penting lainnya.”*

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan SIPD memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan ketepatan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Sistem ini memudahkan integrasi data dari berbagai unit kerja, sehingga tidak hanya mengurangi beban kerja manual tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala teknis yang menjadi tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakstabilan jaringan internet yang sering kali mengganggu akses dan proses pengolahan data dalam sistem. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari sebagian pegawai terkait fitur-fitur dalam SIPD juga menjadi penghambat dalam pemanfaatan sistem secara maksimal. Kondisi ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf PPK SKPD, yang menyampaikan hal berikut:

*“Kestabilan jaringan sering kali menjadi kendala, sehingga akses ke sistem terkadang terganggu. Selain itu, beberapa staf masih memerlukan pelatihan tambahan karena belum semua orang dapat memanfaatkan fitur-fitur sistem secara maksimal. Hal ini menyebabkan proses di tahap awal penerapan menjadi*

---

*agak lambat.” Ia juga menambahkan bahwa meskipun ada tantangan tersebut, SIPD memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. “Dengan peningkatan infrastruktur dan pelatihan yang terus-menerus, saya yakin SIPD dapat menjadi sistem yang benar-benar memudahkan pekerjaan kami.”*

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial dalam kesuksesan implementasi SIPD. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, belum semua staf di tingkat SKPD memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan sistem ini secara optimal. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan pelatihan tambahan yang lebih terfokus agar seluruh pegawai dapat mengoperasikan SIPD dengan baik. Dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, penerapan SIPD telah membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam memenuhi standar yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta peraturan keuangan terkait lainnya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala terkait validasi data, yang sebagian besar disebabkan oleh proses input manual yang kurang tepat.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa SIPD memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIPD lebih mudah diaudit karena data tersusun secara rapi di dalam sistem.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa langkah strategis yang disarankan. Implementasi SIPD di Provinsi Jambi mengalami sejumlah kendala utama. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang sering tidak stabil. Situasi ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengelolaan serta pelaporan data keuangan. Selain itu, kurangnya pengetahuan teknis di kalangan pengguna sistem juga menjadi masalah. Banyak pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur tertentu di SIPD, khususnya mereka yang belum familiar dengan teknologi digital. Faktor lain yang turut menjadi penghambat adalah anggaran yang terbatas untuk mendukung pembaruan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dengan salah satu staf PPK

---

SKPD, yang menyatakan bahwa keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengembangan sistem serta peningkatan kemampuan SDM terkait.

*“Kami menyadari bahwa masalah seperti jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan pemahaman teknis di kalangan sebagian staf dapat mengganggu kinerja sistem. Sebagai upaya solusi, kami telah mengajukan perbaikan infrastruktur jaringan. Selain itu, kami juga rutin menyelenggarakan pelatihan khusus bagi staf yang mengoperasikan SIPD.”*

Pertama, peningkatan fasilitas teknologi, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih handal, sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional SIPD. Infrastruktur yang baik akan membantu mengurangi berbagai kendala teknis yang kerap muncul. Kedua, pelatihan dan pendampingan secara rutin harus diberikan kepada pegawai yang menggunakan SIPD. Program pelatihan ini perlu dirancang dengan matang agar dapat meningkatkan pemahaman teknis dan kemampuan pegawai, sehingga mereka bisa memaksimalkan penggunaan seluruh fitur yang ada dalam sistem.

Selain itu, diperlukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SIPD agar sistem ini tetap sesuai dengan kebutuhan perencanaan anggaran yang terus berubah. Evaluasi tersebut dapat meliputi penilaian terhadap performa sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah memberikan dampak positif yang cukup berarti, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi perencanaan anggaran. Namun, untuk memaksimalkan manfaat sistem ini, dibutuhkan upaya peningkatan infrastruktur, pengembangan kemampuan SDM, serta penyempurnaan fitur-fitur yang ada.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan anggaran. SIPD memudahkan integrasi data serta

---

mempercepat proses pelaporan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti jaringan yang kurang stabil, keterbatasan pemahaman teknis di kalangan staf, serta masalah dalam validasi data. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD perlu terus dikembangkan agar dapat mencapai performa optimalnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pemerintah daerah harus memperbaiki infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet, agar operasional SIPD tidak terganggu.
2. Pelatihan teknis yang berkala dan mendalam untuk staf pengguna SIPD diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem.
3. Penambahan fitur validasi otomatis pada SIPD perlu dilakukan untuk mengurangi kesalahan input data manual, serta pembaruan sistem agar sesuai dengan kebutuhan dinamis perencanaan anggaran.
4. Penerapan SIPD harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, termasuk dari segi kinerja, kepuasan pengguna, dan area perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerapan SIPD di Provinsi Jambi antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah daerah sebaiknya segera mengalokasikan anggaran guna memperbaiki kualitas jaringan internet dan perangkat keras pendukung SIPD. Infrastruktur yang memadai akan menjamin kelancaran operasional sistem tanpa gangguan teknis yang signifikan.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Pelatihan intensif mengenai penggunaan SIPD perlu dilaksanakan secara berkala, meliputi pengenalan fitur-fitur terbaru serta simulasi penggunaan sistem. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung peningkatan kemampuan teknis pegawai.

3. Pengawasan dan Evaluasi Rutin: Diperlukan mekanisme pengawasan yang konsisten terhadap pemanfaatan SIPD. Pemerintah daerah harus mengadakan evaluasi rutin guna mengukur efektivitas sistem serta mengumpulkan masukan dari pengguna untuk perbaikan fitur ke depannya.
4. Pengembangan Sistem yang Lebih Responsif: SIPD harus terus dikembangkan agar lebih user-friendly, termasuk penambahan fitur validasi otomatis, laporan analisis, serta panduan interaktif yang membantu pengguna. Langkah ini akan mendukung proses pelaporan yang lebih cepat dan akurat.

## REFERENSI

1. Dina Triana Wahyuningsih<sup>2</sup>Supanji Setyawan Kartika Pradana Suryatimur. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Perpajakan*, 4, No. 1(1).
2. Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164.
3. Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri ( Sipd Ri ) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan. *Akuntansiku*, 3(1), 14–28.
4. Maryam, N. (2023). Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
5. Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1415–1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
6. Nasution, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ( Bpkad ) Kota Medan. 9(77), 110–116.
7. Rochmanjsah, & Sholeh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. 10(1), 99.
8. Sulaiman. A. (2020). Tantangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam E-Government. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*.